



**WALI NAGARI LUNANG DUA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA NOMOR 02 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG DUA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID- 19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lunang Dua Tahun 2020 Nomor 03)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 19

Mei. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lunang
3. Nagari adalah Nagari Lunang Dua
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT- Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT- Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
 - (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Dua

Ditetapkan di Nagari Lunang Dua pada
tanggal 19 Mei 2020
WALI NAGARI LUNANG DUA



Diundangkan di Nagari Lunang Dua pada
tanggal 19 Mei 2020 SEKRETARIS NAGARI
LUNANG DUA

SAMIYO

BERITA NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2020 NOMOR 03;

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR : 03 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA

No.	N A M A	L/ P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	BUDIMAN SAPUTRO	L	13011001078*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
2.	RONDIYAH	P	13011052118*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
3.	MARJONI	L	13011001078*****	MEKAR JAYA	WIRASWASTA	
4.	KASILAH	L	13011065037*****	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
5.	RYANDI	L	13011001077*****	MEKAR JAYA	WIRASWASTA	
6.	MARTAJI	L	13011001074*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
7.	AHMAD SUYANIS	L	13011005108*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
8.	RIKI WIDIYANSAH	L	13011021049*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
9.	NURDADI PUWANTOMO	L	13011046127*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
10.	SUMARDI	L	13011022028*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
11.	NYAMIRAH	P	13011051065*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
12.	SUTRISMAN	L	13011005017*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
13.	MUKHSIN	L	13011010108*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
14.	ENI HANIFAH	P	13011061117*****	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
15.	MAHMUDIN	L	13011026047*****	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
16.	SARMIAH	P	13011049115*****	MEKAR JAYA	PERDAGANGAN	
17.	KASINO	L	13011021117*****	MEKAR JAYA	BURUH TANI	
18.	MISYATUN	P	13011047077*****	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
19.	SUDIRMAN	L	13011019127*****	MEKAR JAYA	BURUH TANI / PERKEBUNAN	
20.	JUWADI	L	13011004075*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
21.	ARSI	L	13011016074*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
22.	PARMIN	L	13011005026*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
23.	ANDI BAHRI SAPUTRA	L	13011017058*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
24.	RUKIMAN	L	13011028106*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	

25.	NUR HARYADI	L	1301100706*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
26.	SAMINO	L	13011025027*****	MEKAR SARI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
27.	JURIANTO	L	13011021106*****	MEKAR SARI	BURUH HARIAN LEPAS	
28.	RUKMINI	L	13011041077*****	MEKAR SARI	BURUH HARIAN LEPAS	
29.	KUSAINI	L	13011012128*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
30.	ANTON	L	13011017057*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
31.	SUPARMAN	L	13011001078*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
32.	JOHAR FAUZI	L	13011001077*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
33.	KADIMO	L	13011001075*****	MEKAR SARI	PERDAGANGAN	
34.	MUJINARTO	L	13011001075*****	MEKAR SARI	BURUH TANI/PEKEBUN	
35.	DASIKUN	L	13011016068*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
36.	SAMIDI	L	13011005075*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
37.	SODIKUN	L	13011024097*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
38.	SUTARNO	L	13011028036*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
39.	SUGIONO	L	13011005105*****	MEKAR SARI	BURUH TANI/PEKEBUN	
40.	NUR KAMIT	L	13011001077*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
41.	SARMIN	L	13011016067*****	MEKAR SARI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
42.	DEDE KRISTIAN	L	13011011119*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
43.	BAGIYO	L	13011001077*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
44.	WASILAH	P	13011041073*****	MEKAR SARI	BELUM/TIDAK BEKERJA	
45.	SUTRISNO	L	13011023088*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
46.	MUSRIANTO	L	36711217037*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
47.	MOHAMMAD KHOIRON	L	13011004128*****	SIDOMULYO	BURUH HARIAN LEPAS	
48.	ZAENURI	L	13011012097*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
49.	KIRAH	P	13011050083*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
50.	ZAENUDIN	L	13011001075*****	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
51.	DADANG	L	13011006097*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
52.	NOFRIZAL	L	13011007105*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
53.	MADROPINGI	L	13011006074*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
54.	PONIJO	L	13011023025*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
55.	SARYONO SALIM	L	13011004015*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	

56	SUNARTI	P	13011041077*****	SIDOMULYO	MENGURUS RUMAH TANGGA	
57	RAJIMIN	L	13011003028*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
58	DASIM	L	13011028025*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
59	CHARLES	L	13011020037*****	SIDOMULYO	SOPIR TRAVEL	
60	TOLIM	L	13011001074*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
61	KADERI	L	13011006075*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
62	MARTIONO	L	13011006037*****	SIDOMULYO	KARYAWAN SUWASTA	
63	ADEK	L	13011018086*****	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
64	SLAMET	L	13011005107*****	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	
65	SUPI	P	13011041074*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
66	PONIDI	L	13011016067*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
67	JUMARI	L	13011003027*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
68	MIRAH	P	13011056077*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
69	NURYANTO	L	13011013059*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
70	SUKARNI	P	13011061015*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
71	SUYANTO	L	13011003037*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
72	SUWARTINI	P	13711156068*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
73	SUPRIYANTO	L	13011017048*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
74	SUKIDI	L	13011011014*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
75	SITI RAHAYU	P	13011044035*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
76	DARNI KAMSO	L	13011015078*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
77	SUPARMAN	L	13011001078*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
78	JONI	P	13011041074*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
79	SARMINAH	P	13011041073*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
80	AHMAD ALMA'ARIF	L	13011008018*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
61	SUMAR	L	13011005067*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
82	SUKARMAN	L	13011006128*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
83	TUKIYADI	L	13011001010*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
84	AMIAH	P	13011044115*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
85	SARMI	P	13011041075*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
86	RUDIYA NOVENDA	L	13011015119*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	

87	ARI PRASETIO	L	13011028059*****	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	
88	MARIJAH	L	13011050084*****	WUNGU REJO	IBU RUMAH TANGGA	
89	PRAYITNO	L	13011017118*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
90	SUKRI	L	13011004108*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
91	MUHERI	L	13011001073*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
92	SARWIN	L	13011005087*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
93	SYAI'IN	L	1301108056*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
94	KASINAH	P	13011055017*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
95	ULLOH SAEFULLAH	L	13720125038*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
95	MUHAMMAD JAZARI	L	13011011128*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
97	TASAN	L	13011021046*****	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
98	TUPAN	L	13011031126*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
99	DAWEN	P	13011064035*****	WUNGU REJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	
100	RUBADI	L	13011006036*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
101	MESRAN	L	13011001078*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
102	PARIHIN	L	13011022107*****	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	
103	RATINO	L	13011012026*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
104	ALEX SUHENDAR	L	13011021058*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
105	SUMARDI	L	13011001047*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
106	SAMIRAN	L	13011015084*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
107	ABDUL RAHMAN	L	13011030089*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
108	SULISNO	L	13011002058*****	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
109	MARIYEM	P	13011041074*****	WUNGU REJO	PERDAGANGAN	
110	MASJELITA	P	13080757107*****	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
111	WAHIDIN	L	13011003100*****	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada tanggal : 19 Mei 2020
WALI NAGARI LUNANG DUA

